

CASCADING KINERJA

**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPETEN PURWAKARTA**

Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
JL. SURADIREJA NO. 28 TELP. 200221 PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga **Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta** dapat menyusun **Cascading Tahun 2022**, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang **LAKIP** (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Cascading Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yg **transparant** dan **akuntabel**, **Clean Government** dan **Good Governance**.

Akhir kata Cascading ini diharapkan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan Perikanan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Purwakarta, 2022

Plt.Kepala Dinas
Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Purwakarta



Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1968062819932007

DAFTAR ISI

BAB	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Kondisi Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum.....	13
2.3 Cascading Kinerja.....	16
BAB III PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah : profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahannya.

1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Untuk mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Data SDM ASN Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jenis Kepegawaian, Tahun 2022

Pendidikan	Jml	Golongan	Jml	Jenis Kepegawaian	Jml
SD/Sederajat	-	Golongan I	2	PNS Struktural	18
SMP/Sederajat	1	Golongan II	20	PNS Fungsional	17
SMA/Sederajat	19	Golongan III	35	Fungsional Umum/Pelaksana	30
Diploma III	9	Golongan IV	8		
S-1	24				
S-2	12				
JUMLAH	65		65		65

Tabel 2. Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas dan PTT (Non PNS)

Status Kepegawaian	Pendidikan					Jml
	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
Pengadministrasi pada Sub. Bag. Keuangan	2	1	-	-	-	3
Pengadministrasi pada UPTD Perikanan Perairan Umum	-	-	-	-	-	-
Pengawas Hyiene Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1		-	-	-	1
Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	1	-	-	1
Pengambil Sampel	-	-	1	1	-	1
Pengawas Mutu Bibit Ternak	3	-	1	-	-	4
Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	-	-	1	-	-	1
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	1	-	-	-	-	1
Pengadministrasi Umum	6	1	-	-	-	7

Status Kepegawaian	Pendidikan					Jml
	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
Penyusun Pembinaan dan Pola Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	-	-	-	-	-	-
Petugas Pengadministrasi Keuangan	-	-	-	-	-	-
Pengelola Rumah Potong Hewan	-	-	1	-	-	1
Pengelola UPTD Pasar Hewan	-	-	1	-	-	1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	-	-	-	-	3
Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan	-	1	-	-	-	1
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	-	1	-	-	-	1
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Ungas	-	-	-	-	-	-
Tenaga Piket Malam	-	-	7	-	3	10
Tenaga Kebersihan Kantor dan UPTD	-	-	2	1	2	5
JUMLAH						44

1.2.1 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, mempunyai 6 (Enam) unit UPTD yaitu ;

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Purwakarta, serta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 245 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan.

Dinas Perikanan Dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perikanan Dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan

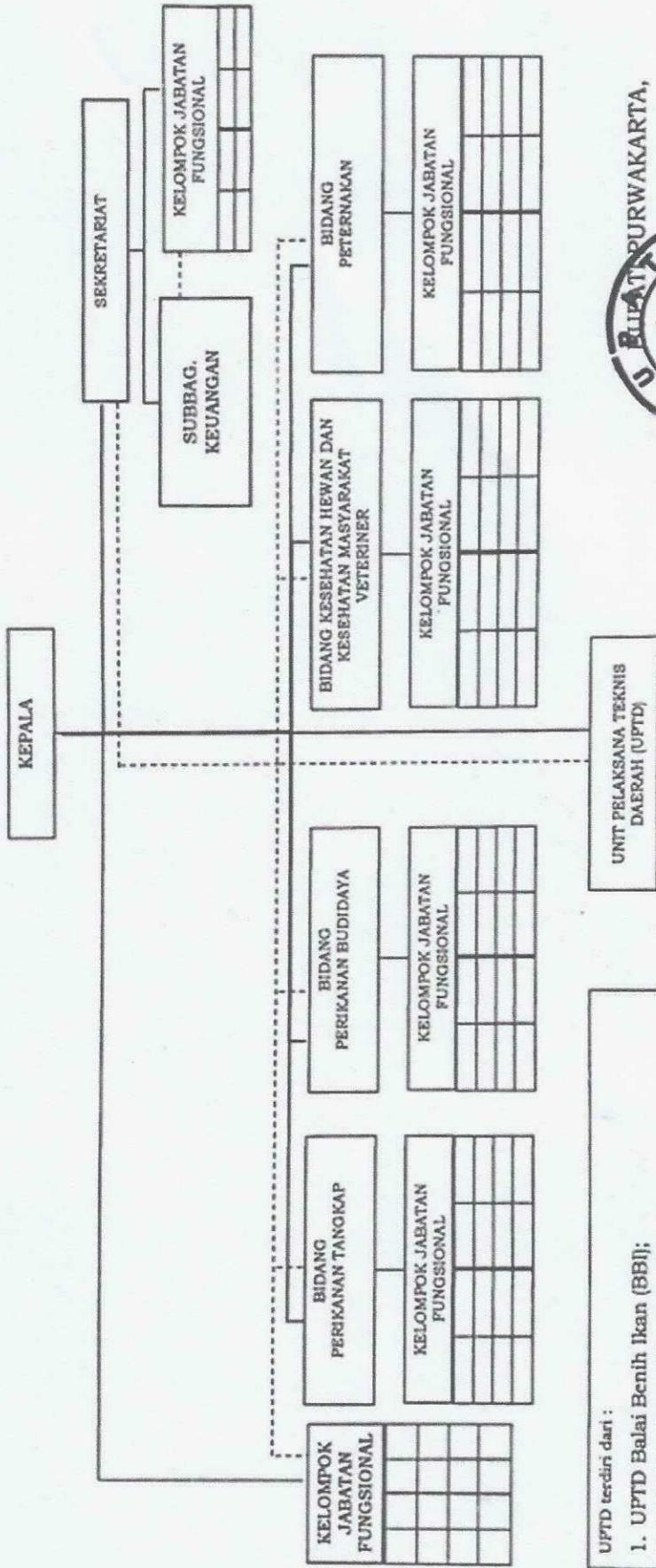
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Secara terstruktur dapat diperlihatkan **Struktur Organisasi**

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 246 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA



- UPTD terdiri dari :
1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
 2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
 3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
 4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
 5. UPTD Pasar Hewan; dan
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

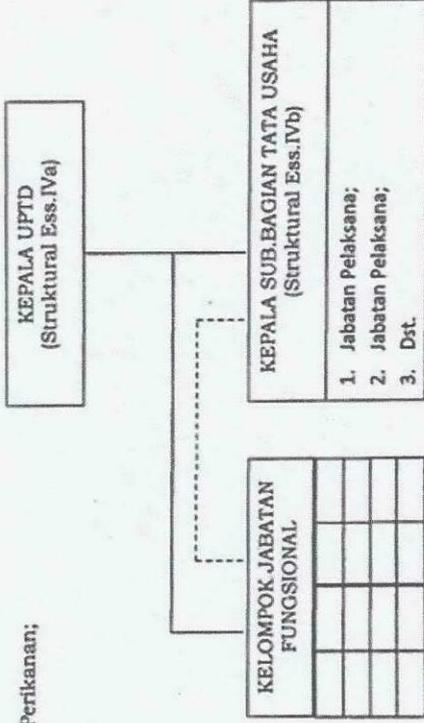


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 249 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

UPTD Kelas A Terdiri dari:

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.



1.4 RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta,.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Peternakan, yang tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2018-2023 perubahan.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2021 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.3 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN

2.1 RENCANA STRATEGIS (2018-2023) Perubahan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 Perubahan telah dirumuskan pada awal tahun 2020, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun ruang lingkup substansi pokok/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan

Kedudukan Sektor Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sangat strategis, yaitu Mewujudkan perekonomian rakyat yang berbasis desa. Untuk mencapai misi tersebut dan untuk memberi pedoman dan arah pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok	Fungsi
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
	2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
	3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
	4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
	5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut.

a. Tujuan ;

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas
3. Meningkatkan penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan Pemanfaatan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan
4. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif , mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan

b. Sasaran ;

1. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern
3. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan

4. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
5. Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan
6. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan
7. Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya ikan di perairan umum
8. Mengembangkan skala usaha kelompok/ kelembagaan perikanan dan peternakan
9. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan *zoonosis* (PHMSZ)

Tabel 11. Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021	Program
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan daging meningkat 2%/ tahun • Penyediaan Telur meningkat 5%/ tahun • Penyediaan susu meningkat 50%/ tahun • Penyediaan ikan meningkat 2%/ tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Laju produksi perikanan budidaya (14% per tahun) • Laju produksi perikanan tangkap (7,5% per tahun) • Laju produksi peternakan (2% pertahun) • Laju populasi ternak (2% per tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proram Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.	Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya ikan di perairan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum (17 kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

1	2	3	4
4.	Mengembangkan skala usaha kelompok/ kelembagaan perikanan dan peternakan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani pelaku agribisnis (100%) per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyuluh Pertanian • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan <i>zoonosis</i> (PHMSZ)	Status kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular (0 kasus)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dukungan Manajemen administrasi perkantoran Dinas Perikanan dan Peternakan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Strategi dan Kebijakan Umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Perikanan dan Peternakan.

Tugas Pokok :	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.		
Fungsi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan; 2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan. 4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya 		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1 Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	1 Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	1 Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
	2 Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	2 Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	
3. Meningkatkan penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan Pemanfaatan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan	1 Meningkatkan penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	1 Meningkatkan ketersediaan pangan hewani dengan penyebaran dan pengembangan ikan dan ternak kepada masyarakat	1 Meningkatkan populasi, produksi dan konsumsi hasil perikanan dan peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
4. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan peternakan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan	1 Pengembangan sarana dan Prasarana budidaya ikan	
		2 Meningkatkan sarana perikanan tangkap dan restocking perairan umum	2 Pengembangan Sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan menerapkan Culture Based Fishiries	
		3 Meningkatkan mutu bibit dan produktivitas ternak	3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) melalui pengembangan wilayah sumber bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), serta penerapan teknologi peternakan melalui Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer	
	2. Meningkatkan pengelolaan kawasan budidaya ikan di perairan umum	1 Mengelola kawasan budidaya dan perairan umum	1 Pengembangan kawasan budidaya dan perairan umum yang ramah lingkungan	
		3. Mengembangkan skala usaha kelompok/ kelembagaan perikanan dan peternakan	2 Membina usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan	1 Peningkatan produk pengolahan hasil perikanan dan peternakan dan penguatan daya saing produk perikanan dan peternakan
				2 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				3 Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan
				4 Pengembangan SDM dan Kelembagaan perikanan dan peternakan yang berwawasan agribisnis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan <i>zoonosis</i> (PHMSZ)	Pencegahan, penanggulangan pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Strategis dan <i>Zoonosis</i> (PHMSZ), penanggulangan Gangguan Reproduksi (Ganrep) pada ternak serta menjamin keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan, Peningkatan status kesehatan hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), Pengawasan lalulintas ternak, pengamatan penyakit hewan dan surveilance, pengawasan peredaran obat hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan mewujudkan keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)

2.3 CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021** dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari **Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022** dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan **gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon** yg ada dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan yg mengindikasikan *tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan* sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Demikian Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermamfaat, kritikan dan saran yg disampaikan sebagai masukan untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

LAMPIRAN

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

- Tujuan 1 : " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif "
- Tujuan 2 : " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas "
- Tujuan 3 : " Meningkatkan penyediaan pangan asal hewan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan "
- Tujuan 3 : " Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan "
- Tujuan 5 : " Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner "

Indikator Kinerja Utama :

- 1. Laju Produksi Perikanan
- 2. Laju Produksi Ternak
- 3. Laju Populasi Ternak

Substansi	Sekretaris			Kepala Bidang Perikanan Tangkap			Kepala Bidang Perikanan Budidaya			Kepala Bidang Peternakan			Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet		
	Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	Kasubag Keuangan	Sub-Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil	Sub-Substansi Usaha Nelayan Kecil	Sub-Substansi Kelembagaan Usaha	Sub-Substansi Sarana dan Prasarana	Sub-Substansi Pembibitan	Sub-Substansi Bina Usaha Peternakan	Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Pakan Ternak	Sub-Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sub-Substansi Pengamanan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan			
Output	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	
Output	Tersedianya Dokumen BMD dan Dokumen Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Keuangan SKPD	Tersedianya data produksi ikan tangkapan, RTP nelayan, dan bahan perumusan kebijakan nelayan kecil Terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan kecil	Tersedianya data kelompok nelayan, pembinaan mitraan usaha nelayan kecil, Terlaksananya kegiatan usaha nelayan kecil, Terlaksananya fasilitas kegiatan mitraan usaha nelayan kecil	Tersedianya data produksi ikan budidaya, Terlaksananya Pembinaan CPiB dan CBIB, Terlaksananya pengawasan HPI	Tersedianya diklat usaha perikanan Budidaya, Terlaksananya Pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha, Terlaksananya pembinaan kelembagaan usaha, Terlaksananya perdistribusian bantuan kelompok	Tersedianya sarana dan prasarana produksi perikanan, Terlaksananya penantuan peredaran dan penerapan mutu pakan ikan dan obat ikan (OIKB), Terlaksananya penerbihan ha katas tanah pembudidaya ikan program lintas sector perikanan.	Tersedianya pengelolaan Kawasan pengendalian pembibitan dan peningkatan produksi ternak	Tersedianya pembinaan pelaku usaha peternakan, kelembagaan peternakan dan promosi komoditas peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan dan meningkatnya produksi pakan yang berkualitas	Tersedianya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan	Tersedianya pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Tersedianya pengalaman penyakit, surveilance dan pengawasan obat hewan		

Plt. Kepala Dinas
Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Purwakarta

Dra. HI SITI IDA HAMIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1968062819932007